

## ANALISIS JARINGAN SOSIAL PADA AKTOR PENGELOLAAN SAMPAH DI DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN BANYUWANGI

Dimas Teguh Prasetyo<sup>1</sup>, Zuli Rhodiyah<sup>2</sup>, Rifka Annisa<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Greeneration Foundation

Jalan Citamiang No. 6, Cibeunying Kidul, Sukamaju, Kota Bandung, Jawa Barat

<sup>2</sup> Teknik Lingkungan, Universitas Jambi

Jambi - Muara Bulian KM 15, Mendalo Darat, Kec Jambi Luar Kota, Jambi

<sup>3</sup> Sosiologi, Universitas Indonesia

Depok, Jawa Barat

---

### Informasi Artikel

Dikirim: 15 November 2021  
Diterima: 24 November 2021

---

### Korespondensi pada penulis:

Telepon:  
0878 7568 6211  
Email:  
[dimas@greeneration.org](mailto:dimas@greeneration.org)

### Abstract

*The development of tourism in Indonesia is like a double-edged sword. One side is able to improve the economy and welfare of the community around tourist destinations. However, on the other hand, it has the potential to generate new waste generation from tourism activities. It needs support from all parties to be able to realize integrated and comprehensive waste management. A qualitative study using social network analysis was conducted in Banyuwangi Regency. Researchers identify relationships between actors related to waste management around tourist destinations. About 21 people from academia, community, general public, local government and entrepreneurs took part in this study. Data collection was carried out using an online questionnaire containing demographic data and 10 questions regarding 5 aspects of solid waste management, namely regulation, institutions, funding, multi-stakeholder participation and technical operations. The results of the social network analysis show that local governments are actors who are assumed to have an important role in the aspects of regulation, institutions, funding and multi-stakeholder participation. In addition, community organizations, academics and businessmen encourage local governments to be able to implement strategic steps for waste management in tourist destinations. This study has implications for the importance of all parties to begin to realize their role in waste management in tourist destinations. However, a collaboration and synergy also need to understand the potential challenges and conflicts of interest between actors*

---

**Keywords:** Sustainable Tourism; Tourist Destination; Waste Management

---

### PENDAHULUAN

Produksi sampah yang berlebihan mengancam lingkungan Indonesia saat ini, yang mana Setiap tahun diperkirakan memproduksi sebanyak 34 juta sampah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2020 memperlihatkan data yang menunjukkan komposisi sampah didominasi oleh sampah organik yang mencapai 50% dari total sampah. Sampah plastik menempati urutan kedua dengan 17%, disusul sampah kertas (12%), dan sampah lainnya (6%) seperti sampah

logam, tekstil, kaca. Masalah sampah juga menghantui dinamika industri pariwisata, yang merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap penimbunan sampah (Kevin, 2021).

Sebagai tinjauan, Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi kuat di sektor destinasi pariwisata, dengan peningkatan pertumbuhan pariwisata pada jumlah wisatawan domestik periode 2016-2019 mencapai satu juta orang, maupun internasional mencapai 30.000 orang dalam rentang waktu yang sama (Pekab Banyuwangi, 2021). Hal tersebut berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Putra *et al.* 2021), yang dapat dibuktikan dengan laju pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai lebih dari 5,8%, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar Rp. 32,46 triliun pada tahun 2010 ke Rp. 55,9 triliun pada 2019, di mana terdapat sekitar 296 ribu Usaha Kecil (UMKM) di kawasan pariwisatanya (Afandi, 2020). Di sisi lain, perkembangan pariwisata yang tidak diiringi dengan manajemen pengelolaan lingkungan yang mumpuni berimbas pada penurunan kualitas lingkungannya sendiri. Survei tahun 2007 menunjukkan bahwa sumber sampah terbesar dalam industri penunjang pariwisata berasal dari sektor kantin, restoran, dan taman (Maharani *et al.*, 2007). Menurut data terbaru 2019 yang dikumpulkan EcoRanger di beberapa lokasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, setidaknya terdapat 2,1 ton sampah yang berasal dari kawasan wisata (Muyassaroh, 2021), yang mana kontribusi penumpukan sampah dari berbagai tempat tersebut tidak diimbangi dengan regulasi peran partisipatoris berbagai pelaku industri pariwisata.

Dalam melihat hal tersebut, Kabupaten Banyuwangi memiliki tingkat partisipasi pelaku industri pariwisata tergolong masih rendah, salah satu penyebabnya 57,14% industri tidak memiliki fasilitas pengelolaan sampah yang lengkap (Maharani *et al.*, 2007), selain itu lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sangat terbatas, ditambah pola konsumsi masyarakat yang terus berjalan yang juga menghasilkan sampah (Marshall & Farahbakhsh dalam Harirah, Isril, & Febrina, 2020), sehingga masalah lingkungan akibat penumpukan sampah tidak bisa terhindarkan. Oleh karena itu, Peneliti berpendapat bahwa permasalahan lingkungan akibat penumpukan sampah di Kabupaten Banyuwangi dikarenakan adanya salah persepsi terhadap peran aktor-aktor dalam industri pariwisata, sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk mengurai permasalahan tersebut. Penelitian ini memberikan analisis jaringan sosial para pelaku yang saling terkait dalam industri pariwisata di Banyuwangi, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai persepsi dan peran masing-masing aktor terkait pengelolaan sampah pada lima kategori, seperti regulasi, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan teknis operasional.

Pembahasan pengelolaan sampah telah diskusikan seperti pada studi Nimah dan Maruf (2019), Alamanda dkk (2020), dan Cianto dkk (2021). Studi Nimah dan Maruf (2019) menjelaskan bahwa praktik pengelolaan sampah di lapangan masih belum merata. Misalnya upaya edukasi yang dilakukan kepada masyarakat tidak diimbangi dengan dukungan dari pihak lain dalam memberikan fasilitas dan peraturan yang mengawal kegiatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Karena pengelolaan sampah diketahui terkait dengan berbagai aspek teknis dan non teknis. Setiap elemen pemangku kepentingan memiliki peran dalam upaya pengelolaan material bernilai ekonomi rendah ini. Oleh karena itu, Alamanda dkk (2020) menyatakan bahwa pengelolaan sampah perlu melihat lima aspek terkait, yaitu aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, dan teknis operasional. Tidak hanya itu, pengelolaan sampah juga perlu mendapat perhatian serius dari pentahelix sebagai akademisi, swasta, masyarakat, pemerintah, dan media.

Sedangkan pada studi Alamanda dkk (2020), memperdalam penjelasan dari lima aspek- aspek yang terkait pada pengelolaan sampah: pertama, aspek regulasi yang menjelaskan sistem yang terkait dengan peran aktor pemerintah. Kedua, aspek kelembagaan dijabarkan sebagai peran lembaga-lembaga tertentu yang terkait dengan tindakan mereka terhadap masalah sampah. Ketiga, aspek pendanaan terkait dengan cost management dalam pengelolaan sampah, maka dari itu paradigma yang menganggap sampah sebagai komoditas dan bernilai ekonomis. Keempat, aspek partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai masyarakat, kelompok, komunitas atau individu manusia yang mempunyai hubungan dan kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Terakhir, aspek operasional adalah upaya kerjasama antar aktor untuk memberikan bantuan dalam melakukan pengelolaan sampah.

Munculnya masalah lingkungan di suatu daerah menjadi tanggung jawab berbagai pihak, bukan hanya sebagian pihak saja (Cox, 2016; Jurin, Roush & Danter, 2010). Studi sebelumnya menemukan bahwa program pengelolaan sampah yang hanya ditangani oleh pemerintah daerah saja

terbukti tidak maksimal (Hartono, 2006). Pemerintah yang biasanya direpresentasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup perlu mendorong lebih banyak kemitraan dalam penanganan sampah, khususnya di destinasi wisata. Pelibatan pihak lain seperti sektor privat dinilai dapat memberikan dampak baik dalam penanganan sampah (Said Fadhil, 2008). Ini selaras dengan studi lainnya yang menyebutkan bahwa kemitraan pemerintah dengan sektor privat menjadi salah satu opsi terbaik dalam penanganan sampah di negara berkembang (Madinah, 2016). Translasi informasi dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat dengan bantuan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lalu, Pendampingan teknis operasional menjadi kunci penting dalam pengelolaan sampah. Argumentasi ini diperkuat dengan adanya studi terbaru yang menunjukkan pendampingan teknis operasional kepada pengurus Bank Sampah secara tidak langsung mampu meningkatkan keterampilan sampah di suatu daerah (Fadhila & Rahman, 2021).

Untuk mengetahui sejauh mana peran dapat dijalankan dan dilaksanakan, maka perlu dilakukan kajian terhadap seluruh elemen stakeholders. Studi Cianto dkk (2021) yang menggunakan jejaring sosial untuk menganalisis peran pemangku kepentingan dalam evaluasi pengelolaan sampah di Bangkok, Thailand, melihat aspek teknis lain di dalamnya, seperti sistem yang menggambarkan kompleksitas interaksi aktor dengan berbagai kepentingan, kekuatan dan pengaruh pengambilan keputusan, serta bagaimana keuntungan dan kerugian lingkungan yang ditimbulkannya. Setiap komponen pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam upaya pengelolaan sampah di lingkungan sosialnya masing-masing, sehingga diharapkan mampu memberikan pengalaman dan poin pembelajaran untuk pengelolaan sampah yang lebih baik di masa mendatang. Sedangkan untuk konteks Banyuwangi dilakukan kajian di kawasan wisata Pulau Merah untuk merumuskan kebijakan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan (Parmawati, Pangestuti, Wike & Hardyansah, 2020). Namun, penelitian sebelumnya masih kurang konteks pariwisata tidak fokus mengeksplorasi peran dan aktor dalam pengelolaan sampah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis jejaring sosial yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada bulan September- Oktober 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antar aktor yang terkait dengan pengelolaan sampah di sekitar destinasi wisata. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner online yang berisi data demografi dan 10 pertanyaan mengenai 5 aspek pengelolaan sampah. Sebanyak 21 orang perwakilan dari 5 kategori pemangku kepentingan di Kabupaten Banyuwangi yang dipilih secara sengaja dan angka subjek tersebut merupakan banyaknya sampel maksimal yang terkumpul.

Data diolah menggunakan proses coding dengan analisis tematik. Analisis jaringan sosial (SNA) digunakan untuk menggambarkan kompleksitas interaksi aktor dengan berbagai kepentingan, kekuatan dan pengaruh pengambilan keputusan, serta bagaimana keuntungan dan kerugian lingkungan yang ditimbulkannya (Cianto dkk, 2021). Analisis ini dapat digunakan untuk pencarian data dan informasi, termasuk interaksi dan relasi antar aktor yang biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik. Studi ini memproses data dengan perangkat lunak NVivo, dengan dasar memberikan kemudahan bagi peserta yang terlibat, kami menyajikan data dengan menggunakan kode-kode tertentu sesuai dengan pelaku yang terlibat, seperti; masyarakat, pemerintahan (Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Pariwisata Banyuwangi), akademisi (Dosen dan Mahasiswa), organisasi masyarakat, dan pemilik perusahaan (hotel, kantin, warung, pengelola objek wisata, dll)

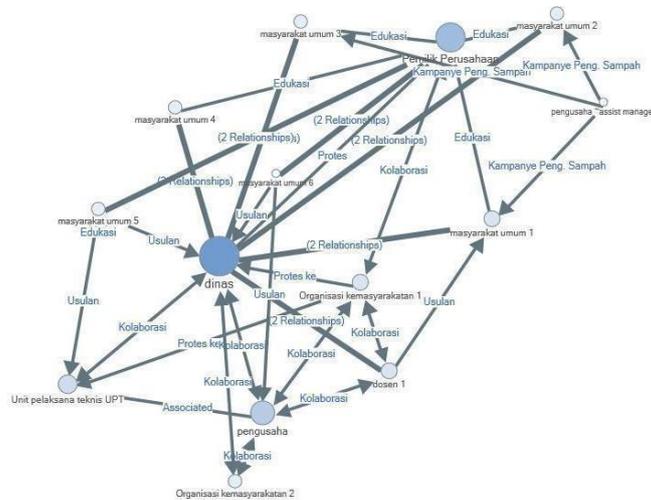
## **HASIL DAN DISKUSI**

Membangun sistem di lingkungan masyarakat untuk membentuk aksi kolektif pengelolaan sampah penting dalam menginternalisasi nilai-nilai tanggung jawab sosial masyarakat terhadap lingkungan dan mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penerapan pengelolaan sampah di destinasi wisata. Kabupaten Banyuwangi sangat membutuhkan sinergi sistem pengelolaan sampah antar setiap pemangku kepentingan di Kawasan Wisata. Temuan SNA sebagai berikut:

### **Aspek Regulasi**

Gambar 1 menunjukkan visualisasi data pada aspek regulasi. Diketahui bahwa terdapat 14 aktor dalam relasi aspek regulasi. Aktor tersebut diantaranya adalah Dinas dengan 12 sudut relasi yang masuk dari aktor lain dan terdapat 6 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Sementara itu,

pengusaha mempunyai 6 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Kemudian, asisten manajer (pengusaha) mempunyai 3 sudut relasi yang mengarah ke aktor lain dengan tanpa sudut relasi masuk ke arahnya. Sedangkan dosen mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain.



**Gambar 1.** Luaran SNA Aspek Regulasi

Tak hanya itu, aktor lain seperti organisasi dan masyarakat umum juga terlibat dalam jaring tersebut. Organisasi kemasyarakatan mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Masyarakat umum 1 mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Masyarakat umum 2 mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Masyarakat umum 3 mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Masyarakat umum 4 mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Masyarakat umum 5 mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain. UPT mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi ke aktor lain. masyarakat umum 6 mempunyai 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain dengan tanpa sudut relasi yang masuk ke arahnya. Mahasiswa mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 4 sudut relasi mengarah ke aktor lain. untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut:

**Tabel 1.** Luaran SNA Aspek Regulasi

Case	Degree	Degree in	Degree out	Betweenness	Closeness
Dosen 1	4	3	4	2,452	0,045
Dosen 2	0	0	0	0	0
Organisasi kemasyarakatan 1	5	3	5	2,667	0,045
Organisasi kemasyarakatan 2	2	2	2	0	0,04
Unit Pelaksana Teknis	4	4	2	1,667	0,043
Dinas	12	12	6	73,024	0,071
Pemilik perusahaan	8	8	6	22,857	0,056
Pengusaha	6	6	5	7,333	0,048
Asisten manajer (pengusaha)	3	0	3	2	0,033
Masyarakat umum 1	4	3	2	9,19	0,045
Masyarakat umum 2	3	2	2	5,738	0,043
Masyarakat umum 3	3	2	2	5,738	0,043
Masyarakat umum 4	2	2	2	0	0,04
Masyarakat umum 5	4	2	5	0,667	0,042
Masyarakat umum 6	3	0	3	0,667	0,042

Adapun hasil analisis diketahui 6 sifat relasi, diantaranya kampanye, edukasi, usulan, protes dan kolaborasi. Pada aspek regulasi, diketahui Dinas adalah aktor utama yang disorot oleh aktor lainnya. Dinas dinilai menjadi aktor utama yang harus berkontribusi lebih dalam aspek penegakan regulasi. Penegakan regulasi dapat dimulai berupa kolaborasi edukasi. Misalnya dengan membuat kampanye pengelolaan sampah bersama organisasi masyarakat. peran pihak lainnya seperti

masyarakat, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan dinilai dapat saling berhubungan dalam sifat kolaborasi dan edukasi.

Hasil juga menunjukkan masih ada ketidakpuasan dari pemilik perusahaan dan organisasi kemasyarakatan kepada Dinas dan Unit Pelaksana Teknis terkait. Ketidakpuasan tersebut disampaikan agar aturan pengelolaan sampah di lokasi wisata dapat dijalankan didorong secara tegas. Usulan-usulan aturan diberikan dari masyarakat dan akademisi agar sosialisasi edukasi pengelolaan sampah bisa berjalan dengan optimal. Kemudian, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan bisa saling berkolaborasi sebagai penggerak kampanye pengelolaan sampah dan juga melakukan pendampingan pada masyarakat.

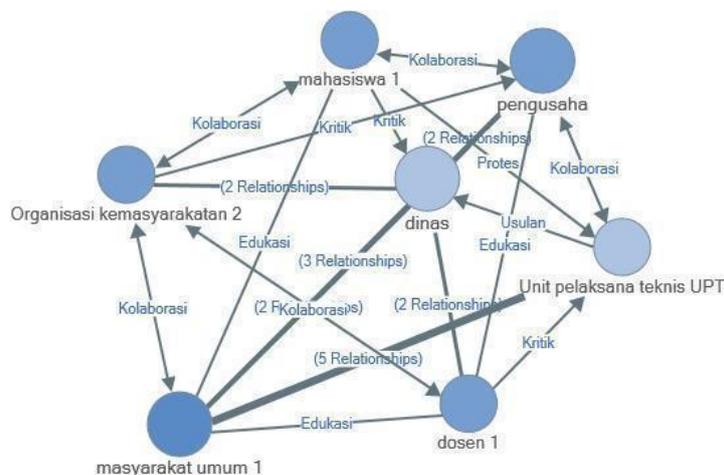
Pemerintah memang sudah seharusnya dapat mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sampah. Hal ini selaras dengan Amanat Undang-Undang Dasar Pasal 28 H Ayat 1 yang menjelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik, salah satunya terkait pengelolaan sampah. Dengan adanya kebijakan tertulis, diharapkan para pemangku kepentingan lainnya dapat melakukan aksi strategis dan teknis dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam konteks pariwisata.

Di tingkat nasional, regulasi manajemen pengelolaan sampah khusus di destinasi wisata telah dibuat. Melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 5 tahun 2020, setidaknya Pemerintah telah memulai langkah strategis dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata bahari. Berdasarkan informasi yang beredar, Kabupaten Banyuwangi telah ditunjuk menjadi satu dari lima destinasi wisata bahari di Indonesia untuk kebutuhan *pilot project* implementasi manajemen persampahan di destinasi wisata. Seiring dengan langkah tersebut, pemerintah daerah hingga lokal dapat menyiapkan peraturan pendukung lainnya untuk meningkatkan keberhasilan manajemen persampahan di destinasi wisata khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Pembuatan kebijakan oleh pemerintah ternyata tidak cukup. Sosialisasi serta pengawasan juga perlu dilakukan secara simultan. Hal ini penting mengingat masyarakat umum termasuk mitra yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata kemungkinan tidak memiliki akses terhadap informasi tersebut. Sebuah aturan yang telah dibuat tetapi tidak disosialisasikan akibatnya akan berujung sia-sia. Sebuah laporan riset dari tim EcoRanger Banyuwangi pada September 2021 ini menemukan bahwa 95% masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan Desa yang dikeluarkan untuk pengelolaan sampah kawasan wisata. Padahal peraturan tersebut telah disahkan sejak awal tahun 2019. Akibatnya, temuan riset menunjukkan bahwa masyarakat relatif memiliki hambatan yang besar untuk mendukung perilaku ramah lingkungan, salah satunya memilah sampah (Greeneration Foundation, 2021). Oleh karena itu, pembuatan kebijakan dan sosialisasi perlu dilakukan menjadi satu paket yang tidak terpisahkan.

**Aspek Kelembagaan**

Berdasarkan hasil analisis diketahui pada aspek kelembagaan bahwa ada 7 aktor dalam relasi yang ada pada aspek kelembagaan. Aktor tersebut diantaranya adalah Dinas dengan 6 sudut relasi yang masuk dari aktor lain dan terdapat 3 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Kemudian, pengusaha mempunyai 6 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Dosen mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain.



**Gambar 2.** Luaran SNA Aspek Kelembagaan

Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Masyarakat umum mempunyai 5 sudut relasi dari aktor lain dan 6 sudut relasi mengarah ke aktor lain. UPT mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi ke aktor lain. Mahasiswa mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 4 sudut relasi mengarah ke aktor lain.

**Tabel 2.** Luaran SNA Aspek Kelembagaan

Case	Degree	Degree in	Degree out	Betweenness	Closeness
Dosen 1	5	4	5	0,4	0,143
Mahasiswa 1	5	3	5	0,4	0,143
Dinas	6	6	3	0,8	0,167
Pengusaha	6	6	5	0,8	0,167
Organisasi kemasyarakatan 2	5	4	5	0,4	0,143
Masyarakat umum 1	6	5	6	0,8	0,167
UPT	5	4	3	0,4	0,143

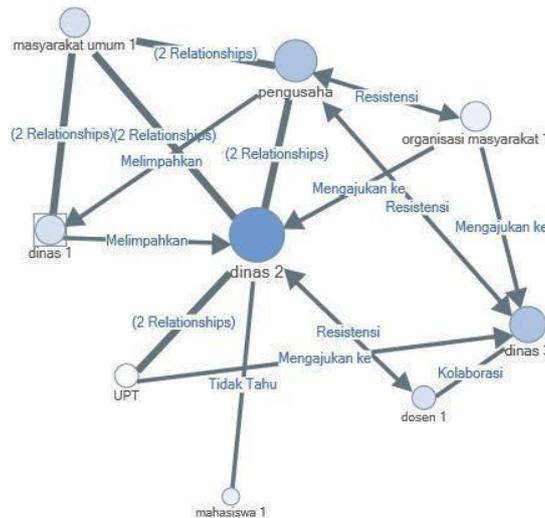
Dalam peran kelembagaan, terdapat 6 sifat relasi. Diantaranya adalah relasi melimpahkan, mengajukan, kolaborasi, resistensi, tidak mengetahui dan kritik. Adapun UPTD dan dinas dalam aspek ini masih menjadi aktor utama. Namun, dalam menjalankan peran kelembagaannya masih terdapat adanya beberapa masukan, kritik, dan protes dari akademisi. Protes tersebut mengenai pengelolaan sampah karena kinerja yang belum maksimal dan belum adanya kolaborasi antar lembaga.

Dari hasil tersebut, dinas dapat melakukan kolaborasi dengan akademisi, pengusaha, serta organisasi kemasyarakatan dalam membentuk kelembagaan yang lebih baik dan melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah. Karena organisasi kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, akademisi dapat melakukan *controlling* yang lebih baik, dan pengusaha dapat melakukan tindakan proaktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kelembagaan yang begitu kuat ini akan menghambat proses pengelolaan sampah karena adanya relasi kuasa struktural. Relasi kuasa struktural dapat juga diubah menjadi faktor penting untuk membentuk sistem keterlibatan dan kolaborasi antar aktor yang lain.

Pada konteks Kabupaten Banyuwangi, upaya penanganan sampah melalui aspek kelembagaan kini sedang berproses. Kabupaten Banyuwangi di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup kini sedang mempersiapkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pengelolaan Sampah. Munculnya UPTD tersebut sebenarnya sudah didorong sejak tahun 2020 lalu (Ramdhani, 2020). Bahkan dalam pertemuan 2020 tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendorong Kabupaten Banyuwangi untuk memiliki Badan Layanan Umum Daerah dalam sektor pengelolaan sampah agar masalah sampah dapat dikelola dengan sistematis dan berkelanjutan. Simultan dengan persiapan tersebut, Pemerintah Daerah sepertinya tetap dapat membuka kolaborasi dengan pihak lain dalam penanganan sampah. Sebagaimana permasalahan sampah yang tidak dapat ditunda, maka dari itu penanganan secara kelembagaan perlu mencari banyak alternatif. Secara umum, pihak pemerintah memang sudah seharusnya menyadari pentingnya kolaborasi dengan lembaga lain dalam pengelolaan sampah.

### Aspek Pendanaan

Hasil analisis pada aspek pendanaan diketahui bahwa terdapat 9 aktor yang memiliki relasi. Diantaranya yakni Dinas 1 dengan 2 sudut relasi yang masuk dari aktor lain serta ada 2 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Dinas 2 dengan 7 sudut relasi yang masuk dari aktor lain sedangkan ada 3 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Dinas 3 dengan 4 sudut relasi yang masuk dari aktor lain dan terdapat 2 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Pengusaha mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain. UPT mempunyai 0 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi ke aktor lain.



**Gambar 3.** Luaran SNA Aspek Pendanaan

Tidak hanya Dinas, akademisi dan masyarakat juga memiliki relasi dalam aspek pendanaan. Dosen mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 1 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. masyarakat umum mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Mahasiswa punya 1 sudut relasi dari aktor lain dan 1 sudut relasi mengarah ke aktor lain.

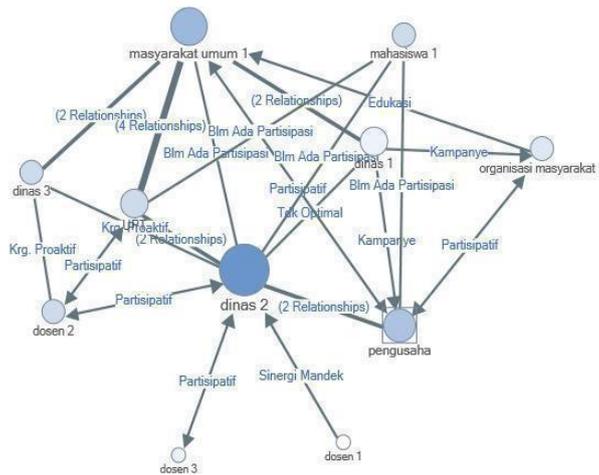
**Tabel 3.** Luaran SNA Aspek Pendanaan

Case	Degree	Degree in	Degree out	Betweenness	Closeness
Dinas 1	3	2	2	0	0,077
Dinas 2	7	7	3	29	0,111
Masyarakat umum 1	3	2	3	0	0,077
Pengusaha	5	4	5	7	0,091
Dinas 3	4	4	2	5	0,077
UPT	2	0	2	1	0,071
Dosen 1	2	2	2	1	0,071
Organisasi masyarakat 1	3	1	3	1	0,077
Mahasiswa 1	1	1	1	0	0,063

Dalam indikator pendanaan, terlihat pihak dinas memiliki peranan kunci untuk mengelola biaya/dana dalam pengelolaan sampah. Terkait biaya, tampaknya pihak dinas sendiri masih dilimpahkan ke pihak dinas satu sama lain dan resisten serta belum terlihat transparansi pengelolaan dana karena pihak masyarakat dan akademisi tidak tahu menahu soal ini. Biaya yang dikelola tidak akuntabel ini dikhawatirkan dapat menghambat proses kolaborasi dan edukasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan juga pengusaha sebagai pihak pengelola wisata. Jadi, untuk informasi terkait pendanaan ini sebaiknya perlu ditingkatkan oleh pihak dinas.

**Aspek Partisipasi Multipihak**

Gambar 4 merupakan visualisasi data dari Partisipasi Multipihak. Diketahui bahwa terdapat 11 aktor dalam relasi yang ada pada aspek Partisipasi Multipihak. Aktor tersebut diantaranya adalah Dinas 1 dengan 1 sudut relasi yang masuk dari aktor lain sedangkan ada 4 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Dinas 2 dengan 9 sudut relasi yang masuk dari aktor lain sedangkan ada 7 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Dinas 3 dengan 1 sudut relasi yang masuk dari aktor lain sedangkan ada 1 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Pengusaha mempunyai 5 sudut relasi dari aktor lain dan 4 sudut relasi mengarah ke aktor lain.



**Gambar 4.** Luaran SNA Aspek Partisipasi Multipihak

Terdapat pula aktor lain yang teridentifikasi dalam analisis jaringan sosial pada aspek partisipasi multipihak. Dosen 1 mempunyai 0 sudut relasi dari aktor lain dan 1 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Dosen 2 mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Dosen 3 mempunyai 1 sudut relasi dari aktor lain dan 1 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Organisasi Kemasyarakatan mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. masyarakat umum mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. UPT mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 4 sudut relasi ke aktor lain. Mahasiswa mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel berikut:

**Tabel 4.** Luaran SNA Aspek Partisipasi Multipihak

Case	Degree	Degree in	Degree out	Betweenness	Closeness
Dinas 1	3	2	2	0	0,077
Dinas 2	7	7	3	29	0,111
Masyarakat umum 1	3	2	3	0	0,077
Pengusaha	5	4	5	7	0,091
Dinas 3	4	4	2	5	0,077
UPT	2	0	2	1	0,071
Dosen 1	2	2	2	1	0,071
Organisasi masyarakat 1	3	1	3	1	0,077
Mahasiswa 1	1	1	1	0	0,063

Terkait dengan indikator partisipasi multipihak, terlihat antar pihak belum membentuk partisipasi multipihak yang tersinkronisasi. Hal tersebut diduga karena masih belum ada peranan partisipasi dari perspektif yang dijelaskan masyarakat dan akademisi (mahasiswa), serta sinergitasnya kurang proaktif dari pihak dinas tersebut. Pihak yang aktif berperan secara partisipatif adalah pihak akademisi (dosen), organisasi kemasyarakatan yang melakukan edukasi dan pengusaha yang membuat kampanye. Partisipasi yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dan pengusaha terlihat lebih optimal dibandingkan pada pihak dinas yang idealnya punya peranan penting dalam pengelolaan sampah secara struktural.

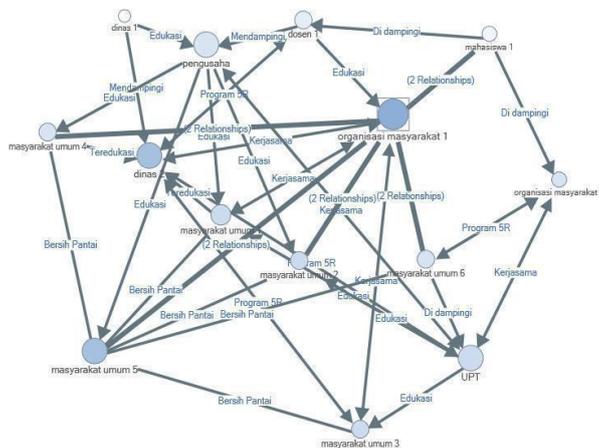
Partisipasi multipihak dapat dibentuk dengan kolaborasi antar lembaga yaitu pihak akademisi (dosen), organisasi kemasyarakatan, pengusaha bersama dengan komitmen pihak dinas. Sinergitas multipihak ini bertujuan untuk membentuk rasa kepedulian memiliki antar-pihak pada pengelolaan sampah di kawasan wisata Kabupaten Banyuwangi, sehingga perlu adanya tindakan proaktif. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan translasi informasi sistem pengelolaan sampah yang kontekstual sesuai dengan keadaan riil di dalam masyarakat.

Salah satu contoh nyata praktik baik pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi multipihak khususnya di destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi adalah program EcoRanger. Sejak 2019, program ini bersama mengajak berbagai pihak dalam penanganan sampah di kawasan wisata

Pulau Merah, Dusun Pancer (Nasution, 2021). Sinergitas antara pelaku usaha, pengelola wisata, wisatawan, perangkat desa, swasta dan pemerintah lokal mampu berkontribusi dalam mengelola sampah lebih dari 190 ton per tahun. Tidak hanya itu, dampak dari partisipasi bersama ini juga mampu memunculkan inisiatif lain bagi masyarakat dalam mengembangkan program edukasi berbasis atraksi wisata seperti *beach clean up*, *educamp*, dan sebagainya. Hingga akhirnya, kegiatan *educamp* menjadi salah satu atraksi wisata berbasis edukasi pengelolaan sampah dalam daftar festival di Banyuwangi pada tahun 2021.

**Aspek Operasional**

Gambar 5 merupakan visualisasi data dari indikator teknis operasional. Dari gambar tersebut dapat dijabarkan bahwa ada 14 aktor dalam relasi yang ada pada Teknik operasional. Aktor selanjutnya yakni Dinas 1 dengan 0 sudut relasi yang masuk dari aktor lain sedangkan ada 1 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Dinas 2 dengan 7 sudut relasi yang masuk dari aktor lain sedangkan ada 4 sudut relasi yang diberikan ke aktor lain. Pengusaha mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 5 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Dosen mempunyai 2 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Organisasi Kemasyarakatan 1 mempunyai 9 sudut relasi dari aktor lain dan 8 sudut relasi mengarah ke aktor lain. Organisasi Kemasyarakatan 2 mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain.



**Gambar 5.** Luanan SNA Aspek Operasional

Masyarakat umum 1 mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. masyarakat umum 2 mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 2 sudut relasi mengarah ke aktor lain. masyarakat umum 3 mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. masyarakat umum 4 mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain. masyarakat umum 5 mempunyai 7 sudut relasi dari aktor lain dan 6 sudut relasi mengarah ke aktor lain. masyarakat umum 6 mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 4 sudut relasi mengarah ke aktor lain. UPT mempunyai 4 sudut relasi dari aktor lain dan 6 sudut relasi ke aktor lain. masyarakat umum 6 mempunyai 3 sudut relasi mengarah ke aktor lain dengan tanpa sudut relasi yang masuk ke arahnya. Mahasiswa mempunyai 3 sudut relasi dari aktor lain dan 4 sudut relasi mengarah ke aktor lain.

**Tabel 5.** Luanan SNA Aspek Operasional

Case	Degree	Degree in	Degree out	Betweenness	Closeness
Dinas 1	2	0	2	0,4	0,037
Pengusaha	7	3	5	18,467	0,053
Dinas 2	7	7	4	18,133	0,053
Masyarakat umum 1	5	4	3	2,1	0,048
Masyarakat umum 2	4	4	2	1,2	0,045
Masyarakat umum 4	4	3	3	1,3	0,043
Masyarakat umum 5	7	7	6	9,8	0,053
UPT	7	4	6	21,867	0,053

Organisasi masyarakat 1	9	9	8	29,3	0,059
Masyarakat umum 3	4	4	3	1,3	0,045
Dosen 1	4	2	3	5,133	0,045
Mahasiswa 1	3	1	3	3,4	0,042
Masyarakat umum 6	4	3	4	4,6	0,043
Organisasi masyarakat 2	3	3	2	3	0,04

Secara teknis operasional, kerja sama dengan upaya melakukan pendampingan untuk menjalankan program merupakan teknis yang dominan dilakukan oleh para aktor. Namun, keterpautan antar aktor tidak terlihat karena masing-masing memiliki peran yang partisipatif. Organisasi kemasyarakatan dan akademisi (dosen) dapat menjadi pendamping pelatihan dan edukasi, serta kerja sama dengan masyarakat dan mahasiswa, maupun dalam suatu gerakan Bersih Pantai. Pihak dinas dan Unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, pengusaha, dan dosen dalam melakukan pendampingan, pelatihan, dan edukasi dalam menjalankan program 5R serta bersih pantai.

Kemudian, pihak dinas dan UPT dapat melakukan pendampingan melalui pelatihan intensif bagi sumber daya manusia dalam organisasi kemasyarakatan, pengusaha, dan akademisi. Lalu, pihak dinas dan UPTD juga melakukan dukungan dengan pemberian fasilitas/peralatan penunjang seperti tempat pembuangan sampah dan juga pendanaan. Sedangkan, pihak masyarakat dan pihak mahasiswa adalah pihak yang memerlukan pendampingan dan pelatihan dalam menjalankan program. Adanya pendampingan tersebut dapat menumbuhkan peran aktif dari kedua pihak yaitu masyarakat dan mahasiswa. Peningkatan kapasitas para pengurus mampu mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap sampah. Perubahan pola pikir tersebut yang selanjutnya mendorong peningkatan kesediaan warga dalam mengumpulkan sampah ke Bank Sampah terdekat. Oleh karena itu, fase pendampingan juga menjadi hal krusial dalam aspek operasional pengelolaan sampah.

## KESIMPULAN

Secara umum, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan sampah Banyuwangi perlu mendapat perhatian dari semua pihak dalam industri pariwisatanya. Pemerintah daerah merupakan aktor yang dianggap memiliki peran penting dalam aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan dan partisipasi multistakeholder. Selain itu, organisasi masyarakat, akademisi, dan pengusaha mendorong pemerintah daerah untuk dapat menerapkan langkah-langkah strategis pengelolaan sampah di destinasi wisata. Kajian ini berimplikasi pada pentingnya semua pihak untuk mulai menyadari perannya dalam pengelolaan sampah di destinasi wisata. Namun demikian, kolaborasi dan sinergi juga perlu memahami potensi tantangan dan konflik kepentingan antar aktor.

Penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan yang melatarbelakanginya. Peneliti tidak secara khusus membatasi kawasan atau kawasan wisata yang menjadi sorotan dalam pengelolaan sampah. Selain itu, jumlah peserta dari masing-masing kategori dalam target peserta tidak merata. Hal ini disebabkan adanya kemauan setiap individu untuk representasi dari setiap kategori yang diwakilinya. Terakhir peneliti mengalami penulisan dalam pendataan karena penelitian dilakukan pada masa darurat Covid-19, sehingga pendataan hanya dilakukan melalui survey online.

## DAFTAR RUJUKAN

- Afandi, U. (2020). *Pariwisata bergairah lagi, dorong ekonomi Banyuwangi*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/nusantara/356319/pariwisata-bergairah-lagi-dorong-ekonomi-banyuwangi>
- Alamanda, D. T., Hadiansyah, H., & Ramdhani, A. (2020). Rancangan solusi pengelolaan sampah dengan konsep Focus Group Discussion (FGD) pentahelix di Kabupaten Garut. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(2), 226-240.
- Caniato, Marco & Vaccari, Mentore & Visvanathan, Chettiyappan & Zurbrugg, Christian. (2014). Using social networks and stakeholder analysis to help evaluate infectious waste management: A step towards holistic assessment. *Waste handling*. 34. 10.1016/j.wasman.2014.02.011.

- Cox, R. (2010). *ENVIRONMENTAL COMMUNICATION and The Public Sphere* (T. R. Armstrong & A. Baker (eds.); 2nd ed.). Sage. <https://ayomenulisfisip.files.wordpress.com/2012/02/materi-1-robert-cox-environmental-communication-and-the-public-sphere.pdf>
- Fadhilla, A. F., & Rahman, A. Z. (2021). Policy outcome analysis of the Guyub Rukun Waste Bank Policy Program based on performance of managers and customers in Kemijen Village Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 205-220.
- Greeneration Foundation. (2021). Laporan *baseline study* BCAD X Kitabisa X EcoRanger. Dokumen internal (belum dipublikasikan).
- Harirah, Z., Isril, H., & Febrina, R. (2020). Politik Pengelolaan Sampah (Studi Tentang Implementasi Kemitraan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 19-35.
- Hartono, E. D. I. (2006). *Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kota Brebes Melalui Peningkatan Kemampuan Pembiayaan*. UNiversitas Diponegoro.
- Jurin, Richard R., Donny Roush, and Jeff Danter. (2010). *Environmental Communication: Skills and Principles for Natural Resource Managers, Scientists, and Engineers*. 2nd Edition. New York: Springer.
- Kevin, F. (2020). *Sampah yang mencemari laut sebagian besar dihasilkan dari sektor pariwisata, kok bisa?* Grid Kids. <https://kids.grid.id/read/472554584/sampah-yang-mencemari-laut-sebagian-besar-dihasilkan-dari-sektor-pariwisata-kok-bisa?page=all>
- Madinah, N. (2016). Solid Waste Management System: Public-Private Partnership, the Best System for Developing Countries. *Nabukeera Madinah. Int. Journal of Engineering Research and Applications Wwww.Ijera.Com*, 6(4), 57–67. [www.ijera.com](http://www.ijera.com)
- Maharani, S. E., Suarna, I. W., & Suyasa, I. W. B. (2007). Karakteristik Sampah dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. *Ecotrophic*, 2(1), 1–8.
- Muyasaroh, S. (2021). *Quick count sampah di TPS Pulau Merah*. Eco Ranger. <https://ecoranger.id/collaboration/quick-count-sampah-di-tps-pulau-merah/>
- Nasution, F. S. (2021). *Greeneration Foundation dan Coca Cola Foundation melalui EcoRanger berkolaborasi menyelesaikan masalah sampah di destinasi wisata*. Eco Ranger. <https://ecoranger.id/collaboration/greeneration-foundation-dan-coca-cola-foundation-indonesia-melalui-ecoranger-berkolaborasi-menyelesaikan-masalah-sampah-di-destinasi-wisata/>
- Nimah, H., & Maruf, M. F. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Pengelolaan Sampah pada Aksi Mitigasi dalam Program Kampung Iklim (PROKLIM) (Studi pada Desa Mojodeso Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro). *Publika*, 7(4).
- Parmawati, R., Pangestuti, E., Wike, W., & Hardyansah, R. (2020). Development and Sustainable Tourism Strategies in Red Islands Beach, Banyuwangi Regency. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, 8(3).
- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. (2021). Data pariwisata. Diakses dari <https://banyuwangikab.go.id/profil/pariwisata.html>
- Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedomasn Pengelolaan Sampah Plastik di Destinasi Wisata Bahari. <https://jdih.kemendparekraf.go.id/>
- Putra, I. G. D. J. S., Karmini, N.L. & Wenagama, I.W. (2021). Pengaruh Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan terhadap PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-*

*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10 (6): 511-524

Ramdhani, Gilar. (2020, November). Atasi masalah sampah, Kemendagri dorong daerah bentuk BLUD Pengelolaan Sampah. <https://www.liputan6.com/news/read/4413107/atasi-masalah-sampah-kemendagri-dorong-daerah-bentuk-blud-pengelolaan-sampah>

Said, F. D. (2008). *Pola Kemitraan antara Pemerintah Kota dan Swasta dalam Pembangunan Daerah di Kalimantan*. Samarinda. LAN Samarinda.

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. (2020). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>